

# ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR KABUPATEN KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

**Syaza Nuri Mahera, Zul Azhar, Mike Triani**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang  
Fax. (0751) 447366. E-mail [info@unp.ac.id](mailto:info@unp.ac.id)  
[sazamahera@gmail.com](mailto:sazamahera@gmail.com)

**Abstract :** *This research is aims to analyze the effect of Economic Growth and the number of poducers toward revenue of retribution in seven regencies in West Sumatra. Method that being used is Panel Least Square and is used Random Effect Model (REM). Data used is panel data from 2012-2016 from Badan Pusat Statistik, Badan Keuangan Sumatra Barat, and DJPK Indonesia. The estimation results show that Economic growth has a positive and significant effect on retribution and Sellers has a positive and significant effect on retribution. This result shows that economic growth and sellers has partial effect to revenue of retribution. This study is to give information about government income specially retribution and government could increase service facility of market to achieved revenue target from retribution.*

**Keywords:** *Retribution, Economic Growth, producers*

**Abstraks :** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Pedagang Terhadap Penerimaan Retribusi Tujuh Kabupaten Kota Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah menggunakan persamaan regresi panel dan menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM). Pada penelitian ini digunakan data panel tahun 2012-2016 yang dikumpulkan melalui dokumentasi dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Badan Keuangan Sumatera Barat, DJPK Indonesia. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara linear berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar dan jumlah pedagang secara linier berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan jumlah pedagang berpengaruh terhdap penerimaan retribusi pasar. Studi ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pendapatan pemerintah khususnya retribusi pasar dan juga diharapkan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan fasilitas pelayanan pasar agar penerimaan retribusi pasar dapat selalu mecapai target yang telah ditetapkan.*

**Kata Kunci:** *Retribusi Pasar, Pertumbuhan Ekonomi, Pedagang Pasar*

Pembangunan dan pengembangan suatu wilayah merupakan keputusan dan juga intervensi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mendorong proses pembangunan kearah yang diinginkan secara menyeluruh. Untuk membiayai pembangunan daerah yang cukup besar, maka daerah dituntut mandiri dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Kemandirian daerah merupakan bagian dari kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Melalui kebijakan tersebut akan dapat terwujud kondisi sosial

ekonomi yang diharapkan akan dapat mendorong proses pembangunan daerah ke arah yang diinginkan baik pada masa sekarang maupun di masa akan datang.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Daerah dituntut untuk aktif dalam menggali dan juga berusaha lebih melihat potensi sumber-sumber ekonomi untuk dikembangkan dan sumber daya dalam membangun pertumbuhan ekonominya. Dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang cukup besar yang berasal dari keuangan daerah. Keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil retribusi, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Karena keterbatasan pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan biaya untuk pembangunan daerah yang cukup tinggi maka peranan pendapatan asli daerah harus ditingkatkan agar penyelenggaraan pembangunan daerah dapat terwujud seperti yang diharapkan.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif selama lima tahun terakhir ini. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tujuh kabupaten kota provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh rata-rata juga memiliki pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Pada tahun 2016, realisasi paling tinggi terdapat di Kota Padang dimana sumber penerimaan pendapatan asli daerah terbesar berasal dari pajak daerah, dan realisasi paling rendah terdapat di Kota Solok. Menurut pemerintah Sumatera Barat belum meratanya penerimaan PAD ini disebabkan karena belum optimalnya penggarapan potensi sumber-sumber PAD, seperti masih belum meratanya pembangunan infrastruktur, pemerintah harus memperhatikan potensi daerah sehingga PAD dapat tergarap lebih optimal untuk membiayai pembangunan daerah, beberapa diantaranya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan juga retribusi daerah.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen penting dalam penerimaan daerah yakni penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan dua sektor tersebut berpeluang besar dalam kontribusi penerimaan daerah dan juga sumber yang penting dalam membiayai kegiatan pembangunan. Pemerintah perlu lebih optimal untuk mengembangkan sumber pendapatan daerah untuk pembangunan diantaranya penerimaan retribusi daerah. Retribusi daerah sangat berpotensi untuk diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi jasa-jasa yang berkaitan dengan pelayanan umum, usaha-usaha tertentu maupun yang menyangkut perizinan tertentu. Retribusi daerah sekarang ini berpeluang besar untuk ditingkatkan karena pemerintah daerah memiliki wewenang dan diatur oleh undang-undang dalam memungut retribusi sehingga nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan PAD, termasuk salah satunya retribusi pasar.

Pertambahan jumlah penduduk juga akan menuntut masyarakat dalam memenuhi kebutuhan publik seperti pelayanan prasarana umum, salah satunya kebutuhan pelayanan pasar. Pasar sebagai sarana pelayanan publik dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Karena pasar dapat memuat hasil sumber daya alam yang dimiliki yang akan diolah menjadi kebutuhan dan juga sebagai tempat untuk menampung industri rumah tangga daerah, dimana pasar menjadi tempat transaksi jual beli antara pedagang dan juga pembeli. Sehingga pasar sangat berpotensi untuk lebih dioptimalkan penggalan sumber dana daerah dengan cara pemerintah dapat menyediakan sarana kepada para pedagang yang nantinya pedagang akan membayar balas jasa atas fasilitas yang disediakan pemerintah, yang nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan daerah.

Realisasi retribusi pasar di tujuh kabupaten kota Sumatera Barat sepanjang tahun 2012-2016 rata-rata berfluktuasi. Menurut Yoda (2014) terdapat beberapa penyebab masih rendahnya penerimaan retribusi pasar, beberapa diantaranya adalah masih belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan pasar, belum optimalnya regulasi menyangkut retribusi pasar, rendahnya pengelolaan dan pengawasan penerimaan retribusi pasar, masih rendahnya kesadaran wajib retribusi yakni pedagang dalam membayar kewajibannya dan juga masih kurangnya perhatian pemerintah dalam memperhatikan kenyamanan pedagang dengan petugas dinas pasar. Jumlah pedagang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudiarto (2004) bahwa jumlah pedagang los, kios, dan hari aktifitas kunjungan pasar secara bersama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap retribusi pasar. Jumlah pedagang adegan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap retribusi pasar.

Pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi penerimaan retribusi pasar. Temuan Yuliani (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan jumlah pedagang los, jumlah pedagang kios bersama-sama memiliki pengaruh terhadap retribusi pasar Kabupaten Lebong. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang sebagai wajib retribusi memiliki pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar dan juga pertumbuhan ekonomi yang menjadi acuan dalam menilai kebijakan pembangunan memiliki pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar. Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah pedagang terhadap penerimaan retribusi pasar tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat menggunakan metode Random Effect Model (REM). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pendapatan pemerintah khususnya retribusi pasar dan juga diharapkan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan fasilitas pelayanan pasar agar penerimaan retribusi pasar dapat selalu mencapai target yang telah ditetapkan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Retribusi Pasar**

Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas [asar tradisional/sederhana berupa peralatan los, kios, yang dikelola oleh daerah, yang

khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta Darwin (2010) retribusi pasar merupakan retribusi daerah yang masuk dalam salah satu jenis retribusi jasa umum.

Dalam retribusi pasar, prinsip dalam penetapan struktur dan juga besarnya penetapan tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi (Patmawati dalam Handayani, 2017). Sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah bahwa pemerintah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang nantinya akan terwujud kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan cara menetapkan penerimaan pajak dan retribusi daerah termasuk retribusi pasar sebagai penerimaan daerah.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Boediono (1985) kenaikan output perkapita dalam jangka panjang merupakan pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuncoro (2004) PDRB perkapita merupakan rata-rata gambaran pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil proses produksi di suatu daerah. Perolehan nilai PDRB perkapita dapat dilakukan dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan penambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, kebahagiaan, rasa aman, dan tentram yang dirasakan masyarakat luas.

Pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan pemerintah, seperti halnya teori Peacock dan Wisemen menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam keadaan normal akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah juga akan semakin besar. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan daerah.

Masrofi (2004) menyebutkan bahwa apabila seseorang memiliki peningkatan pendapatan perkapita yang terus meningkat berarti tingkat kesejahteraannya juga akan semakin meningkat. Hal ini berarti semakin tinggi kemampuan seseorang dalam membayar pungutan yang telah ditetapkan pemerintah. Berarti semakin meningkat pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkat juga potensi sumber penerimaan daerah.

### **Pedagang**

Pedagang pasar merupakan totalitas jumlah orang yang mempunyai aktivitas di pasar sebagai penjual barang/jasa yang menempati kios/los dan sarana perdagangan lainnya. Teori mengenai variabel pedagang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar tidak terlepas dari pengertian retribusi pasar itu sendiri yaitu pembayaran dari balas jasa atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa peralatan los/kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Maka retribusi dapat dikenakan kepada wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut (Siahaan, 2016)

Dalam hal ini pedagang pasar yang menikmati dan juga menerima fasilitas pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dan juga pedagang merupakan subjek retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum yang termasuk didalamnya retribusi pasar.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder panel yang merupakan gabungan data time series dan cross section dari tahun 2012-2016 tujuh kabupaten kota provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari situs BPS, Badan Keuangan Daerah Sumatera Barat, DJPK Indonesia. Data yang diperoleh yakni pertumbuhan ekonomi dimana PDRB perkapita (ribu rupiah) merupakan indikator, jumlah pedagang (orang) dan juga retribusi pasar (rupiah) tujuh kabupaten kota Sumatera Barat.

Dalam penelitian ini dibahas seberapa besar pengaruh variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan analisis regresi panel dan menggunakan metode Random Effect Model. Dimana retribusi pasar sebagai variabel dependen. Pertumbuhan ekonomi, dan pedagang sebagai variabel independen.

Model yang digunakan dalam analisis penelitian ini yaitu:

$$\text{Log}Y_{it} = \beta_0 + \beta_1\text{Log}X_{1it} + \beta_2\text{Log}X_{2it} + U_{it} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana  $Y_{it}$  merupakan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar,  $X_{1it}$  merupakan Pertumbuhan Ekonomi, dan  $X_{2it}$  merupakan Jumlah Pedagang.

**HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, dan jumlah pedagang terhadap penerimaan retribusi pasar di tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB perkapita tujuh kabupaten kota Sumatera Barat dan jumlah pedagang di lihat dari jumlah pedagang pasar di tujuh kabupaten kota Sumatera Barat.

Dari hasil pengujian persamaan dengan menggunakan aplikasi evIEWS 8 dapat terlihat bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dari hubungan antar variabel tersebut diperoleh persamaan regresi panel sebagai berikut:

$$\text{Log} Y_{it}=0.725+1.657 \text{Log}X_{1it}+0.325 \text{Log}X_{2it} \dots\dots\dots (2)$$

**Tabel 1 Hasil Estimasi Random Effect Model**

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 35

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.725374	8.106623	0.089479	0.9293
LOG(X1)	1.657412	0.803435	2.062907	0.0473
LOG(X2)	0.325831	0.162675	2.002959	0.0537
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.620457	0.6088
Idiosyncratic random			0.497391	0.3912
Weighted Statistics				
R-squared	0.250844	Mean dependent var		6.814152
Adjusted R-squared	0.204022	S.D. dependent var		0.553724
S.E. of regression	0.494019	Sum squared resid		7.809754
F-statistic	5.357372	Durbin-Watson stat		1.339694
Prob(F-statistic)	0.009844			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.584289	Mean dependent var		20.19143
Sum squared resid	16.48848	Durbin-Watson stat		0.835914

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi (X1) memiliki pengaruh positif terhadap retribusi pasar (Y) tujuh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dengan koefisien regresi 1,657. Hal ini berarti apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1% maka akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar tujuh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,657%. Hal ini berarti semakin meningkat pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat dengan asumsi ceteris paribus.

Pada model regresi juga dapat dilihat bahwa variabel jumlah pedagang (X2) berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi pasar (Y) tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat dengan koefisien regresi sebesar 0,325. Dimana dalam hal ini berarti apabila jumlah pedagang meningkat sebesar 1% maka penerimaan retribusi pasar tujuh kabupaten kota meningkat sebesar 0,325%. Hal ini berarti,

semakin meningkat jumlah pedagang maka penerimaan retribusi pasar akan meningkat di tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera barat dengan asumsi ceteris paribus.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui kontribusi yang dapat diberikan oleh variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen yang diukur dengan persentase. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai R-Squared sebesar 0,250. Hal tersebut berarti bahwa sebesar 25 persen penerimaan retribusi pasar di pengaruhi oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi , dan Jumlah Pedagang. Sedangkan sisanya 75 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model atau tidak dimasukkan dalam penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Pertumbuhan Ekonomi terhadap Retribusi Pasar**

Dari hasil analisis data pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat. Dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,04 dan koefisien regresinya sebesar 1,65% artinya pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% maka penerimaan retribusi pasar akan meningkat sebesar 1,65%.

Keadaan ini terjadi karena salah satu indikator pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi adalah adanya pemerataan pendapatan masyarakat, serta meningkatnya sektor industri, meningkatnya kesejahteraan masyarakat seiring dengan terbukanya lapangan kerja baru, atau meningkatnya kegiatan kewirausahaan masyarakat, meningkatnya usaha masyarakat terutama usaha masyarakat di pasar tradisional yang dikelola masyarakat akan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah yakni retribusi pasar, oleh sebab itu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin mendorong meningkatnya retribusi pasar di tujuh kabupaten kota Sumatera Barat.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Permana (2014) yang menyebutkan bahwa PDRB perkapita mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kota Semarang. Nilai PDRB perkapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, berarti semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah maka semakin besar potensi penerimaan daerah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang relevan yaitu PDRB perkapita mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung yang diteliti oleh Yuniza (2016), dan juga sesuai dengan penelitian Yuliani (2012) bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penerimaan retribusi pasar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di daerah tersebut. Dengan banyaknya lapangan kerja yang ada maka akan banyak penduduk yang bekerja dan memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbelanja di pasar. Dengan demikian para pedagang dapat

memperoleh keuntungan sehingga dapat membayar retribusi pasar. Walaupun nilai PDRB perkapita belum tentu dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di suatu daerah, namun nilai PDRB perkapita ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah.

Meningkatnya PDRB ini berdampak pada naiknya kesejahteraan penduduk, membaiknya pendapatan, konsumsi hingga kebutuhan gizi masyarakat, yang nantinya dapat mampu mempengaruhi penerimaan pemerintah. Sesuai dengan teori Peacock dan Wiseman pada saat keadaan normal meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin meningkat, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang juga akan semakin meningkat. Teori ini mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah salah satunya penerimaan retribusi pasar.

Hasil ini juga sejalan dengan Hukum Wagner yang menyebutkan bahwa, dalam suatu perekonomian di dalam masyarakat, apabila jumlah pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat karena disebabkan adanya penerimaan pendapatan yang diperoleh melalui pajak dan retribusi dalam kegiatan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

### **Pedagang terhadap Retribusi Pasar**

Dari hasil analisis data pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa jumlah pedagang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat dengan koefisien regresi sebesar 0,32% artinya jika jumlah penduduk naik sebesar 1% maka retribusi pasar juga akan meningkat sebesar 0,32%.

Banyaknya jumlah pedagang pasar menunjukkan baiknya fasilitas pelayanan pasar seperti los, atau kios yang disediakan oleh pemerintah daerah. Semakin banyak fasilitas yang disediakan maka jumlah pedagang akan makin meningkat yang nantinya akan berpengaruh pada daya beli masyarakat sehingga akan mempengaruhi penerimaan daerah atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yuliani (2011) bahwa jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi pasar Kabupaten Lebong. Hal ini menunjukkan semakin tinggi peningkatan jumlah pedagang kios dan jumlah pedagang los maka penerimaan retribusi pasar juga akan meningkat.

Hasil ini juga sesuai dengan pengertian bahwa retribusi dapat dikenakan kepada wajib retribusi yaitu orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi (Siahaan, 2016). Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Sudiarto (2011) yang menyatakan bahwa jumlah pedagang adegan, jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los dan hari aktifitas berpengaruh positif terhadap retribusi pasar di Kabupaten Klaten. Pedagang sendiri diartikan sebagai orang atau badan yang menjual barang atau jasa kepada konsumen baik dalam jumlah besar, kecil ataupun satuan.



Penerimaan retribusi pasar dapat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah pedagang yang ada di dalam pasar tersebut karena pedagang merupakan orang atau badan yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Retribusi bukan hanya dikenakan kepada pedagang kios dan los, namun retribusi juga dipungut kepada pedagang kaki lima (PKL) harian yang tidak dapat dihitung jumlahnya yang berjualan di sekitar pasar. Dalam hal ini retribusi daerah merupakan balas jasa dari adanya retribusi daerah langsung dapat ditunjuk. Retribusi pasar dibayar karena ada penggunaan ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi. Dalam hal ini retribusi pasar hanya dikenakan kepada pedagang yang berjualan di dalam pasar tersebut, baik pedagang yang berjualan di kios maupun los ataupun sarana perdagangan (yang berada di pasar) yang disediakan pemerintah.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Panel yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, dan jumlah pedagang terhadap penerimaan retribusi pasar tujuh kabupaten kota Sumatera Barat selama 5 tahun periode penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat, hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar di tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat. Jumlah pedagang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat, hal ini berarti semakin besar jumlah pedagang maka akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar di tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah pedagang secara bersamaan memberikan pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar di tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya serta dari hasil penelitian ini dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran yakni disarankan kepada pemerintah tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat dalam menetapkan target pendapatan dari retribusi pasar perlu memperhatikan kebijakan untuk melakukan penyesuaian penetapan tarif retribusi yang tertuang dalam peraturan daerah sehingga realisasi pendapatan dapat tercapai dengan target yang telah ditetapkan. Disarankan kepada Dinas Pasar atau Dinas perdagangan tujuh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mengoptimalkan petugas pemungut retribusi dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dari sektor penerimaan retribusi pasar untuk mencapai target penerimaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu masih sedikitnya variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar yang dibahas. Untuk itu disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian dengan sampel dan variabel yang lebih banyak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Handayani, Sutri. Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Universitas Islam Lamongan.
- Permana, Ardana Indra dan Heniwati Retno Handayani. 2014. *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang*. Diponegoro Journal of Economics Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014.
- Rani, Hening Fitria Sarasati El. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan Periode 2005-2014)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Siahaan, P. Marihot. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali pers.
- Yuliani, Revolina Ellya. 2012. *Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Lebong*. Univeristas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu.
- Yuniza, Ekaliza. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Yoda, Tilawatil Ciseta. 2014. *Analisis Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang*. Skripsi Universitas Negeri Padang.